

KEBIJAKAN MULTIKULTURAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP MINORITAS MUSLIM DI KANADA (2001-2023)

Siti Muthmainnah Nur Sulistiani¹, Fitri Sari Setyorini²

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2}

sitimuthmainnahns@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kebijakan multikultural Kanada serta dampaknya terhadap minoritas Muslim dari tahun 2001-2023. Fokus kajian penelitian ini ada pada penilaian efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan mengacu pada teori multikulturalisme Will Kymlicka, penelitian ini menggunakan metode sejarah dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan multikultural memberikan perlindungan secara normatif, implementasinya belum sepenuhnya berhasil meredam dampak diskriminasi atau Islamofobia. Pengesahan Bill 21 di Quebec pada tahun 2019 menunjukkan bahwa masih ada kebijakan yang membatasi kebebasan beragama. Meskipun demikian, komunitas Muslim berhasil meningkatkan partisipasi mereka dalam ranah sosial, politik, dan keagamaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan multikultural Kanada pada periode 2001–2023 memberikan dampak yang ambivalen bagi minoritas Muslim. Di satu sisi, pemerintah federal terus menegaskan komitmennya terhadap multikulturalisme dan pencegahan Islamofobia, namun di sisi lain, terdapat kebijakan yang membatasi ekspresi keagamaan minoritas Muslim di Kanada.

Kata Kunci: Multikulturalisme, Muslim, Kebijakan, Islamofobia

ABSTRACT

This study aims to analyze the dynamics of Canada's multicultural policies and their impact on the Muslim minority from 2001 to 2023. Focusing on an assessment of the policies' effectiveness. Drawing on Will Kymlicka's theory of multiculturalism, the research employs a historical method and utilizes a literature review for data collection. The findings indicate that while multicultural policies offer normative protection, their implementation has not fully succeeded in mitigating the effects of discrimination or Islamophobia. The enactment of Bill 21 in Quebec in 2019 demonstrates the continued existence of policies that restrict religious freedom. Nevertheless, the Muslim community has successfully increased its participation in social, political, and religious spheres. The study concludes that Canada's multicultural policies during the 2001–2023 period have had an ambivalent impact on the Muslim minority; on one hand, the federal government consistently reaffirms its commitment to multiculturalism and the prevention of Islamophobia, yet on the other, there are policies that curtail the religious expression of the Muslim minority in Canada.

Keywords: Multiculturalism, Muslims, Policy, Islamophobia.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa waktu terakhir, isu mengenai keberagaman budaya dan agama semakin menjadi perhatian utama dalam diskusi global, terutama di negara-negara barat yang mengalami lonjakan besar dalam arus migrasi internasional. Kedatangan kelompok imigran dengan berbagai latar belakang, budaya, etnis, serta agama yang beragam mendorong negara-negara tersebut untuk merumuskan kebijakan yang dapat mengelola keragaman sosial dengan cara yang adil dan damai. Dalam hal ini, multikulturalisme muncul sebagai pendekatan dalam kebijakan yang menekankan pengakuan pada perbedaan, perlindungan hak-hak kelompok yang minoritas, serta berusaha untuk menciptakan hubungan sosial yang setara antar kelompok dalam masyarakat. Perbedaan yang ada dalam masyarakat yang tidak diatur dengan baik bisa menimbulkan berbagai permasalahan, seperti radikalisme, perpecahan sosial, dan konflik antara kelompok mayoritas dan minoritas (Pamuji & Mawardi, 2023).

Multikulturalisme adalah pandangan yang diterapkan dalam kebijakan-kebijakan yang menekankan pengakuan terhadap perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat (Sarpini & Mawardi, 2023). Perubahan besar dalam dinamika global terjadi setelah peristiwa serangan pada 11 September 2001, yang kemudian membawa dampak serius terhadap cara pandang masyarakat, terutama di negara-negara barat terhadap Islam ataupun komunitas Muslim. Peristiwa serangan 11 September 2001 (9/11) di Amerika Serikat menjadi titik balik penting dalam hubungan internasional pada awal abad ke-21. Peristiwa yang menewaskan 2.977 orang akibat pembajakan empat pesawat komersial ini mendorong perubahan signifikan dalam kebijakan keamanan dan strategi pemberantasan terorisme di berbagai negara.

Insiden ini memiliki pengaruh besar dalam menciptakan citra negatif serta kecenderungan umum untuk menggeneralisasikan umat Muslim atau dalam konteks islamofobia hal ini berarti kebiasaan menyamaratakan seluruh umat Muslim berdasarkan tindakan sebagian kecil kelompok, sehingga umat Muslim sering kali dipandang sebagai satu kelompok yang identik dengan radikalisme atau ancaman keamanan, tanpa memperhatikan keragaman dan realitas yang sebenarnya, yang kemudian memperkuat munculnya islamofobia. Prasangka antar umat beragama adalah pandangan atau stereotip negatif yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu karena identitas agamanya (Sustanto & Mawardi, 2023). Sikap ini terlihat bukan hanya dalam prasangka, tetapi juga dalam tindakan permusuhan terhadap Muslim sebagai kelompok keagamaan. Konflik keagamaan sering terjadi karena perbedaan pemahaman adanya opini atau penilaian negatif dari satu kelompok terhadap kelompok agama lainnya (Suwarno & Mawardi, 2023).

Salah satu negara yang mengalami peningkatan islamofobia adalah Kanada. Meskipun Kanada dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagamannya atau yang biasa dikenal dengan multikulturalisme. Identitas yang multikultural ini tidak hanya muncul dari banyaknya etnis ataupun dari budaya warga negaranya, tetapi juga didukung dengan adanya kebijakan resmi dari Pemerintah Kanada yang menghargai, mengakui, dan juga mendukung keberagaman tersebut.

Dalam periode 2001 hingga 2023, kebijakan multikultural ini menunjukkan kelanjutan lintas pemerintahan, meskipun setiap perdana menteri mengambil pendekatan yang berbeda. Pada masa Jean Chretien (1993-2003), multikulturalisme tetap dijaga sebagai kebijakan nasional berdasarkan *Canadian Multiculturalism Act*.

Pemerintah menekankan pentingnya mengakui beragam budaya serta memberikan hak yang sama kepada semua warga negara. Kebijakan ini kemudian dilanjutkan oleh Paul Martin (2003-2006), yang tetap mendukung multikulturalisme dengan berbagai upaya meningkatkan integrasi imigran dan partisipasi sosial ekonomi kelompok minoritas (Canadian Heritage, 2018). Pada masa ini pemerintah lebih menekankan pada penguatan kesetaraan sosial, rekonsiliasi dengan masyarakat adat, dan perlindungan hak-hak minoritas, sehingga tidak lagi hanya berfokus pada pengakuan keragaman budaya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Stephen Harper (2006-2015), multikulturalisme tetap dijadikan kebijakan resmi negara, meskipun pendekatan yang digunakan lebih cenderung konservatif dengan fokus pada aspek integrasi dan keamanan sosial (Canadian Heritage, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan multikulturalisme masih menjadi bagian dari kerangka negara. Perkembangan kebijakan terjadi saat masa Perdana Menteri Justin Trudeau (2015 – sekarang), di mana multikulturalisme didorong dengan cara yang lebih maju. Pemerintah memperkuat kebijakan ini dengan menerapkan strategi anti-rasisme, meningkatkan dukungan bagi komunitas multikultural, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Trudeau juga menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan utama Kanada (P. M. of Canada, 2021). Semua perdana menteri Kanada selama periode 2001 hingga 2023 secara sadar mendukung kebijakan multikulturalisme, meskipun dengan tingkat kepedulian dan cara penyampaian yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa multikulturalisme telah dijadikan sebagai kebijakan negara yang berkelanjutan (state policy).

Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa efektif kebijakan multikultural di Kanada dalam melindungi komunitas Muslim di tengah meningkatnya prasangka dan juga diskriminasi yang terjadi. Walaupun Kanada memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjamin kesetaraan dan menghargai perbedaan, tetapi kenyataannya komunitas Muslim masih berhadapan dengan berbagai bentuk diskriminasi, baik yang muncul secara halus melalui stereotip, bias media dan meningkatnya ujaran kebencian terkait isu-isu global. Situasi ini menciptakan ketegangan antara prinsip-prinsip multikulturalisme yang ideal dan kenyataan yang ada.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang telah mengkaji mengenai isu multikulturalisme dan kelompok minoritas di Kanada dari berbagai sudut pandang, Mohatareh Nabavi (2022) dalam artikel yang berjudul *“Canadian Muslim Reactive Identity Formation in the Face of Discrimination: The Possibilities of Imagined Localities”* yang membahas pembentukan identitas Muslim di Kanada sebagai respons terhadap diskriminasi dan islamofobia yang terjadi dalam masyarakat multikultural, perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pembentukan identitas Islam di Kanada. Selanjutnya, Putri Santi dkk. (2025) dalam artikel berjudul *“Dinamika Multikulturalisme Global tentang Kebebasan Beragama dalam Perspektif Hukum dan HAM”* yang menganalisis penerapan kebebasan beragama di Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat dari sudut pandang hukum dan hak asasi manusia, perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada multikulturalisme dan kebebasan beragama dari perspektif hukum dan HAM. Sementara itu, artikel karya Dimas Andhika dan Viani Puspita Sari (2023) yang berjudul *“Strategi Anti Rasisme Kanada terkait Keamanan*

Manusia terhadap Komunitas Minoritas Etnis Tionghoa-Kanada dan Kulit Hitam di Era Pandemi COVID-19 pada 2020–2022” yang membahas mengenai strategi pemerintah Kanada dalam melindungi kelompok minoritas melalui kebijakan anti-rasisme, perbedaannya adalah penelitian tersebut mengkaji strategi anti-rasisme terhadap komunitas Tionghoa-Kanada dan kulit hitam. Terakhir, artikel karya Alyah Fridayanti, Iqbal Athallah Yusra, dan Avril Aura Ervista Eries (2024) berjudul “Analisis Perbandingan Multikulturalisme sebagai Kebijakan Publik antara Indonesia dengan Kanada” membahas penerapan multikulturalisme sebagai kebijakan publik di Indonesia dan Kanada, perbedaannya adalah penelitian tersebut membandingkan kebijakan multikulturalisme Indonesia dan Kanada. Dari kajian literatur tersebut, ditemukan adanya *research gap* yang cukup jelas. Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek terkait multikulturalisme di Kanada, seperti pembentukan identitas Muslim di tengah diskriminasi, kebebasan beragama dalam masyarakat multikultural, perlindungan terhadap kelompok minoritas melalui strategi anti-rasisme, dan kebijakan multikultural sebagai kebijakan publik. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum banyak membahas secara khusus mengenai bagaimana kebijakan multikultural Kanada berdampak pada kehidupan minoritas Muslim. Oleh karena itu masih ada ruang untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan multikultural dengan kondisi kehidupan minoritas Muslim di Kanada.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang secara khusus mengkaji dampak kebijakan multikultural Kanada terhadap minoritas Muslim. Penelitian ini tidak hanya membahas mengenai konsep multikulturalisme maupun kondisi masyarakat Muslim di Kanada, tetapi penelitian ini juga bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi hak-hak minoritas, mendukung proses integrasi, serta mengatasi berbagai tantangan atau masalah yang masih dihadapi oleh komunitas Muslim.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori multikulturalisme Will Kymlicka, menurut Kymlicka multikulturalisme adalah cara pandang yang mengakui bahwa masyarakat modern terdiri dari berbagai kelompok budaya yang memiliki identitas, bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda. Dalam kondisi ini, negara tidak cukup hanya memberikan hak yang sama kepada semua warga negara, tetapi juga harus mengakui dan melindungi hak-hak khusus bagi kelompok minoritas agar mereka bisa mempertahankan budaya mereka dan terlibat secara adil dalam kehidupan bersama masyarakat (Kymlicka, 1995).

Kaidah teori multikulturalisme Will Kymlicka yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui keberagaman budaya sebagai bagian dari masyarakat, memberikan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, serta menjamin kesempatan yang setara bagi kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi tanpa harus kehilangan identitas budayanya. Dari perspektif Kymlicka penelitian ini dapat menganalisis bagaimana pemerintah Kanada mengelola keberagaman budaya dan agama, khususnya dalam memberikan pengakuan dan perlindungan bagi komunitas Muslim sebagai kelompok Minoritas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai seberapa efektif multikulturalisme sebagai kebijakan sekaligus mengungkap dinamika yang dialami minoritas Muslim dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat yang secara ideal mengusung keterbukaan dan keberagaman.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*Library Research*) yang berfokus pada analisis kebijakan multikultural dan dampaknya terhadap minoritas Muslim selama periode 2001-2023. Rentang tahun 2001-2023 dipilih karena tahun 2001 menjadi awal meningkatnya islamofobia pasca peristiwa 9/11 yang memengaruhi kebijakan multikultural di Kanada. Tahun 2023 dipilih sebagai batas akhir untuk melihat perkembangan kebijakan multikultural dan dampaknya terhadap minoritas Muslim secara menyeluruh. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri dan menelaah arsip Pemerintah Kanada, laporan, artikel jurnal, dan juga publikasi ilmiah terkait. Pada tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari lima tahapan yaitu pemilihan topik, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi atau kritik sumber, interpretasi (penafsiran) dan historiografi atau penulisan (Kuntowijoyo, 2018). Pemilihan topik, dalam pemilihan topik penelitian penting untuk mempertimbangkan sejauh mana bisa dilakukan dengan jangka waktu yang ada, kesesuaian dan kemampuan serta ketersediaan sumber-sumber yang relevan dan bisa dijadikan rujukan. Pemilihan topik ini didasarkan pada pendekatan intelektual karena mengkaji relevansi kebijakan multikultural Kanada dalam menghadapi meningkatnya Islamofobia serta dampaknya terhadap minoritas Muslim.

Pada tahapan heuristik atau pengumpulan sumber yaitu dengan mengakses artikel atau jurnal akademik melalui *Google Scholar* dan *Jstore*, kemudian mengakses dokumen atau publikasi resmi pemerintah Kanada melalui situs *Government of Canada*, *Prime Minister of Canada*, dan *Canadian Heritage*. Untuk sumber primer penelitian ini berasal dari peraturan

perundang-undangan Kanada, laporan evaluasi pemerintah, dan laporan tahunan resmi negara. Kemudian untuk sumber sekundernya terdiri dari artikel jurnal, tesis, laporan lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil dan publikasi lainnya yang mengkaji isu multikulturalisme di Kanada.

Selanjutnya adalah tahapan verifikasi atau kritik sumber, dalam tahapan ini data dan sumber-sumber yang telah dikumpulkan diuji validitas dan kredibilitasnya melalui kritik eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan keaslian sumber dengan mengidentifikasi asal sumber, penulis, tahun terbit, serta lembaga yang menerbitkannya, terutama untuk dokumen resmi negara dan publikasi akademik dan untuk kritik internal dilakukan dengan menilai isi sumber secara kritis yaitu menelaah isi sumber, membandingkan informasi antar sumber, serta menilai kesesuaian data dengan konteks penelitian. Di tahap keempat yaitu interpretasi, yang di mana dilakukan penafsiran terhadap fakta sejarah yang sudah diverifikasi. Dalam tahapan ini, data dianalisis untuk memahami keterkaitan antara kebijakan multikultural di Kanada dengan pengalaman nyata yang dialami komunitas minoritas Muslim.

Kemudian di tahap terakhir yaitu historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah yang terstruktur dan argumentatif, pada tahapan ini semua temuan penelitian digabungkan menjadi narasi ilmiah yang menguraikan perkembangan kebijakan multikultural di Kanada dan dampaknya terhadap minoritas Muslim sepanjang periode 2001-2023.

HASIL PENELITIAN

Kebijakan Multikultural Sebelum 9/11

Sebelum terjadi peristiwa 9/11, Kanada sudah menerapkan kebijakan multikultural (*Multiculturalism Policy*) pada tahun 1971, penguatan perlindungan hak melalui

Canadian Charter of Rights Freedoms pada tahun 1982, dan disahkannya Undang-undang Multikultural Kanada (*Canadian Multiculturalism Act*) pada tahun 1988. Kondisi ini mendukung berkembangnya komunitas Muslim di Kanada, seiring bertambahnya arus imigrasi. Meskipun masih ditemukan adanya kasus diskriminasi dan rasisme, islamofobia belum menjadi isu utama dalam kebijakan publik Kanada sebelum peristiwa 11 September 2001.

Dinamika Kebijakan Multikultural Pasca 9/11

Komunitas Muslim telah hadir di Kanada sejak abad ke-19 melalui gelombang imigrasi dari berbagai wilayah, seperti Suriah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika Utara. Pada awalnya mereka bekerja sebagai pedagang dan kemudian berkembang ke berbagai sektor pekerjaan. Keberadaan komunitas Muslim tersebut didukung oleh kebijakan multikultural Kanada yang memberikan pengakuan terhadap keberagaman budaya serta menjamin hak kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun peristiwa serangan pada 11 September 2001 atau yang biasa disebut dengan 9/11 menjadi titik balik utama yang mempengaruhi perkembangan kebijakan multikultural di Kanada. Pada tahun 2001, pemerintah Kanada mengesahkan *Anti Terrorism Act*.

Pemerintah melakukan pemindahan pengelolaan program multikulturalisme pada tahun 2008, yang awalnya di bawah *Department of Canadian Heritage* (PCH) berpindah ke *Citizen and Immigration Canada* (CIC). Pada tanggal 1 April 2010, pemerintah Kanada menetapkan tujuan baru dan pada 4 November 2015, pengelolaan program multikulturalisme dikembalikan lagi *Department of Canadian Heritage* (PCH). Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengubah program yang sebelumnya

bernama *Inter-Action* telah diperbarui dan diperluas menjadi *Community Support, Multiculturalism and Anti Racism Initiatives* (CSMARI) dan pada tahun 2019 hingga 2022, pemerintah Kanada meluncurkan *Canada's Anti-Racism Strategy 2019-2022*. Pada Januari 2023, pemerintah Kanada mengangkat *Special Representative on Combatting Islamophobia* sebagai penghubung antara pemerintah dengan komunitas Muslim. Selain itu, organisasi masyarakat Muslim juga dilibatkan dalam penyampaian aspirasi dan masukan terhadap berbagai kebijakan, hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Islamofobia dan Keterbatasan Perlindungan Kebijakan

Kanada dikenal sebagai negara yang menerapkan kebijakan multikultural, namun masih tetap terjadi praktik islamofobia dalam bentuk kekerasan maupun kebijakan publik. Serangan di Masjid Kota Quebec pada bulan Januari 2017 menjadi momen krusial, peristiwa penembakan ini merenggut nyawa hingga 6 orang jamaah Muslim dan melukai banyak orang lainnya. Pada tahun yang sama, pemerintah mengesahkan Motion M-103 sebagai bentuk respons dari pemerintah, yang mengakui bahwa islamofobia sebagai bentuk diskriminasi. Islamofobia juga tercermin dalam kebijakan publik melalui Bill 21 yang diberlakukan oleh pemerintah Quebec menjadi *An Act Respecting the Laicity of the State* pada tahun 2019.

Contoh lainnya dari peristiwa islamofobia adalah pembunuhan keluarga Muslim di London, Ontario pada 6 Juni 2021 yang menewaskan 4 orang. Pada tahun 2022, seorang karyawan Muslim berusia 54 tahun menjadi korban penganiayaan di sebuah hotel di Markham, Ontario. Selanjutnya pada tahun 2023, seorang perempuan Muslim menjadi korban percobaan pembakaran di Perpustakaan Ajax, Ontario dan pada tahun yang sama juga ada dugaan penyerangan

terhadap seorang pengacara Muslim oleh polisi di Gedung Pengadilan Oshawa.

Dampak Kebijakan Multikultural Pada Komunitas Muslim

Program-program dari kebijakan multikultural berhasil memperkuat komunitas Muslim lokal, dengan mendanai kegiatan dialog antar agama dan mendukung pendidikan yang melawan prasangka. Kemudian adanya pengakuan resmi terhadap identitas Muslim yang terlihat dalam kebebasan mendirikan tempat ibadah ataupun menjalankan praktik keagamaan, pelaksanaan pendidikan berbasis agama, serta ruang partisipasi Muslim dalam kehidupan sosial dan politik. Selain itu penerapan kebijakan multikultural turut membuka ruang yang lebih luas bagi minoritas Muslim untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan sipil.

Prinsip kesetaraan serta perlindungan dari diskriminasi memberikan kesempatan yang lebih adil bagi komunitas Muslim untuk terlibat dalam bidang pendidikan, dunia kerja, dan organisasi masyarakat sipil. Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat posisi sosial dan ekonomi mereka, tetapi juga mendorong kontribusi aktif dalam membangun wacana publik yang lebih inklusif dan beragam.

Dari sisi demografi, komunitas Muslim menjadi salah satu kelompok minoritas yang berkembang pesat di Kanada. Dalam bidang politik, keterlibatan Muslim di Kanada bisa dilihat dari bertambahnya jumlah tokoh Muslim yang ada di pemerintahan dan parlemen. Omar Alghabra terpilih menjadi anggota parlemen pada tahun 2006 dan selanjutnya menjabat sebagai Menteri Transportasi Kanada dalam kabinet pemerintahan Justin Trudeau. Kemudian, pada tahun 2015, Iqra Khalid memperkenalkan Motion M-103 yang mendorong pemerintah Kanada untuk mengkaji dan menangani rasisme sistematis

serta islamofobia Kanada. Setelah itu, pada tahun 2017, Ahmad Hussen menjadi Menteri Imigrasi, Pengungsi, dan Kewarganegaraan di Kanada.

PEMBAHASAN

Kebijakan Multikultural Sebelum 9/11

Sebelum terjadi peristiwa 9/11, Kanada sudah dikenal sebagai salah satu negara yang menjadikan multikulturalisme sebagai kebijakan resmi negara. Kebijakan multikultural (*Multiculturalism Policy*) diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Pierre Elliot Trudeau, sebagai respons terhadap meningkatnya keberagaman etnis, agama, dan budaya akibat imigrasi. Lalu pada tahun 1982, disahkan *Constitution Act*, yang didalamnya memuat *Canadian Charter of Rights Freedom*. Piagam ini menjadi landasan konstitusional dalam menjamin hak-hak dasar setiap warga negara, termasuk kebebasan beragama dan berekspresi, hak atas kesetaraan, serta perlindungan terhadap diskriminasi. Selain itu *Section 27* (pasal 27), menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam piagam harus ditafsirkan dengan tetap memperhatikan pelestarian dan penguatan warisan multikultural masyarakat Kanada (Justice, 2024).

Komitmen ini diperkuat lagi melalui pengesahan Undang-undang Multikulturalisme Kanada (*Canadian Multiculturalism Act*) pada tahun 1988. Undang-undang multikulturalisme Kanada ini berfungsi sebagai kerangka hukum untuk mempromosikan keragaman, kesetaraan, dan inklusi di Kanada, dengan mengakui bahwa multikulturalisme adalah bagian yang sangat penting dari identitas Kanada. Undang-undang ini menjadikan Kanada sebagai negara pertama di dunia yang mengesahkan kebijakan multikulturalisme dalam undang-undang (Canadian Heritage, 2024).

Penerapan kebijakan multikultural memengaruhi perkembangan komunitas Muslim. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari data statistik Kanada yang menunjukkan jumlah penduduk Muslim tahun 1991 ada 253.265 jiwa (0,9%) dari total penduduk, lalu bertambah menjadi 579.640 jiwa (2,0%) pada tahun 2001 (S. Canada, 2003). Meskipun demikian, keberagaman ini tidak sepenuhnya menghilangkan prasangka terhadap kelompok tertentu, termasuk umat Muslim. Pada tahun 1990-an, istilah islamofobia mulai digunakan untuk menggambarkan ketakutan, prasangka, dan permusuhan yang ditujukan kepada Islam maupun umat Muslim. Istilah ini menjadi terkenal melalui laporan dari Runnymede Trust berjudul *Islamophobia : A Challenge for Us All* yang terbit pada tahun 1997, yang menjelaskan islamofobia sebagai pandangan negatif yang menghasilkan stereotip, diskriminasi, serta perlakuan tidak adil terhadap umat Muslim (Jamil, 2012). Jadi, bisa dipahami bahwa sentimen anti-Muslim sudah ada sebelum peristiwa 11 September 2001. Walaupun pada masa itu istilah islamofobia masih jarang digunakan, namun setelah terjadinya peristiwa 9/11, istilah ini mulai digunakan lebih luas untuk menjelaskan meningkatnya diskriminasi dan kekerasan terhadap umat Muslim di berbagai negara.

Dengan demikian, sebelum adanya peristiwa 11 September 2001, Kanada sudah memiliki kebijakan multikultural yang kuat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberagaman. Namun, kebijakan ini belum sepenuhnya menghilangkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Peristiwa 11 September 2001, kemudian menjadi titik balik yang mengubah dinamika hubungan antara kebijakan multikultural, keamanan nasional, dan kehidupan minoritas Muslim.

Dinamika Kebijakan Multikultural Pasca 9/11

Masuknya komunitas Muslim ke Kanada sudah dimulai sejak abad ke-19, kehadiran mereka menjadi awal terbentuknya komunitas Muslim yang kemudian berkembang di Kanada. Muslim datang ke Kanada sebagai imigran yang mencari peluang kerja dan kehidupan yang lebih baik, mereka berasal dari Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Utara, dan berbagai daerah lainnya. Imigran Muslim pertama yang tercatat datang pada awal abad ke-19, sebagian besar merupakan pedagang dan pekerja dari Suriah, yang kemudian bekerja dalam bidang perdagangan, pembuatan gula, dan industri lainnya yang berada di Quebec dan Ontario (Wibowo, 2023).

Komunitas Muslim di Kanada merupakan bagian dari kelompok minoritas diaspora, karena mereka terbentuk dari orang-orang yang pindah dari negara lain, lalu menetap dan membangun kehidupan baru di Kanada. Mereka membawa identitas budaya dan agama dari negara asalnya, namun tetap beradaptasi dalam masyarakat multikultural Kanada sambil mempertahankan identitas.

Kebijakan multikultural Kanada periode 2001-2023 mengalami perubahan sebagai respon dari perkembangan kondisi sosial dan politik. Peningkatan keberagaman masyarakat, arus migrasi, serta adanya tantangan baru seperti isu keamanan dan diskriminasi mendorong pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap implementasi kebijakan multikultural. Setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001, pemerintah Kanada mengesahkan *Anti Terrorism Act* (ATA) 2001 sebagai undang-undang untuk memperkuat keamanan dan mencegah tindak terorisme. Meskipun ATA bukan bagian dari kebijakan multikultural, penerapannya memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut karena meningkatkan pengawasan terhadap komunitas Muslim.

Hal ini terlihat dengan disahkannya *Anti Terrorism Act*, yang memberi wewenang yang luas kepada pihak berwenang untuk melakukan pengawasan dan penahanan terhadap tindakan terorisme demi menjaga keamanan negara. Pada periode ini, muncullah tuntutan untuk melakukan penyesuaian program dan juga strategi implementatif terutama pada sektor integrasi imigran, penguatan dialog antar agama, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas dari perlakuan diskriminatif. Walaupun Kanada terlihat sangat ramah dan terbuka bagi seluruh ras dan etnis, namun nyatanya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari sering ditemukan kasus rasisme (Andhika & Puspita Sari, 2023).

Pada tahun 2008, pemerintah melakukan perubahan dengan pemindahan pengelolaan program multikulturalisme dari *Department of Canadian Heritage* (PCH) ke *Citizen and Immigration Canada* (CIC). Selama berada di bawah CIC, program ini diarahkan untuk membantu imigran sekaligus memperkuat kohesi sosial. Pada 1 April 2010, pemerintah menetapkan tujuan baru, yaitu membangun masyarakat Sosial-Kohesif, meningkatkan responsivitas institusi terhadap keberagaman masyarakat, dan terlibat aktif dalam diskusi tentang multikulturalisme dan keberagaman di tingkat Internasional. Kemudian dengan disediakannya dana hibah (*grants & contributions*) melalui program *Inter-Action*, pemerintah memberikan dukungan bagi organisasi masyarakat untuk mendorong interaksi antarbudaya, toleransi, dan juga inklusi sosial (Canadian Heritage, 2018). Selain itu ada juga kampanye kesadaran publik yang dilakukan pemerintah seperti kampanye anti rasisme dan juga promosi untuk mendukung keberagaman budaya, yang bertujuan untuk mengurangi peningkatan Islamofobia. Melalui kampanye ini, pemerintah juga berusaha untuk mengintegrasikan eksistensi Muslim sebagai

bagian dari komponen identitas multikultural Kanada dan memperbaiki pandangan publik melalui upaya pendidikan serta penyuluhan melalui media. Pemerintah juga berusaha membuat lembaga pelayanan publik seperti sekolah, kesehatan, kepolisian, dan layanan sosial agar dapat melayani komunitas yang beragam, termasuk Muslim. Dengan cara memberikan pelatihan dan panduan khusus kepada orang-orang yang bekerja di sekolah, kepolisian, kesehatan, dan lembaga pelayanan sosial. Pelatihan ini bertujuan agar para petugas yang bekerja di sana lebih memahami perbedaan budaya dan agama sehingga tidak bersikap salah paham atau diskriminatif.

Pada 4 November 2015, pengelolaan program multikulturalisme dikembalikan lagi *Department of Canadian Heritage* (PCH). Pengalihan ini menunjukkan bahwa multikulturalisme tidak hanya terkait dengan kebijakan imigrasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keberagaman, identitas nasional, dan kohesi sosial di Kanada. Seiring meningkatnya pemahaman bahwa kebijakan multikultural tidak selalu mampu dalam mengatasi ketidakadilan struktural, Kanada mulai beralih ke paradigma kebijakan dari sekedar pengakuan atas keberagaman menuju pendekatan yang lebih aktif melalui strategi anti rasisme. Pada tahun 2018, pemerintah mengubah program yang sebelumnya bernama *Inter-Action* telah diperbarui dan diperluas menjadi *Community Support, Multiculturalism and Anti Racism Initiatives* (CSMARI), yaitu sebuah program yang berada di bawah naungan *Canadian Heritage* dan merupakan komponen penting dari strategi Anti Rasisme Kanada. Program ini berfokus pada pemberian dukungan bagi komunitas yang mengalami diskriminasi melalui penyelenggaraan dialog antar agama, pendidikan mengenai anti-Muslim, kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam, dan dukungan

penguatan kapasitas untuk organisasi Muslim.

Pada tahun 2019, pemerintah Kanada meluncurkan *Canada's Anti-Racism Strategy 2019-2022* sebagai langkah untuk memperkuat implementasi kebijakan multikultural dalam mengatasi berbagai bentuk rasisme dan diskriminasi. Strategi ini bertujuan membentuk masyarakat yang lebih inklusif dengan memperkuat peran pemerintah dalam menangani masalah rasisme, memberikan bantuan kepada komunitas yang terkena dampak, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghargai perbedaan (Canadian Heritage, 2021).

Bagi komunitas Muslim di Kanada, adanya CSMARI sangat penting. Laporan-laporan resmi pemerintah termasuk *Annual Report on the Canadian Multiculturalism Act* dan dokumen *Canada's Anti Racism Strategy*. Menunjukkan bahwa komunitas Muslim sering menjadi sasaran stereotip, diskriminasi, dan tindakan kebencian. Melalui CSMARI, banyak langkah yang diluncurkan untuk melawan islamofobia, seperti dialog antar agama di pusat komunitas, lokakarya mengenai bias anti Muslim di sekolah, kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman tentang Islam, dan dukungan penguatan kapasitas untuk organisasi Muslim yang berfokus pada pendidikan dan layanan sosial. CSMARI menjadi bukti bahwa negara berupaya menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman, inklusif, dan adil bagi seluruh warganya. Pendekatan ini menunjukkan perubahan yang signifikan dari yang awalnya multikulturalisme yang bersifat menjunjung keberagaman menuju kebijakan yang lebih aktif dalam menangani diskriminasi dan melindungi kelompok rentan dalam kehidupan sehari-hari.

Perkembangan semakin terlihat pada tahun 2023 dengan pengangkatan *Special Representative on Combatting Islamophobia* atau bisa disebut juga perwakilan khusus yang memerangi islamofobia, dengan menunjuk Amira Elgawaby sebagai perwakilan khusus pertama Kanada. Pengangkatan perwakilan khusus ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap meningkatnya islamofobia serta memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan komunitas Muslim (Canadian Heritage, 2025). Posisi ini memiliki peran sebagai pejuang, penasihat, dan perwakilan untuk mendukung dan meningkatkan upaya pemerintah federal dalam memerangi Islamofobia, rasisme, diskriminasi, dan juga intoleransi agama (P. M. of Canada, 2023). Selain itu, keterlibatan organisasi seperti *National Council of Canadian Muslims* (NCCM) yang berperan sebagai wakil dari komunitas Muslim dalam berbagai diskusi dan pembuatan kebijakan di Kanada. Mereka bekerja untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan Muslim diperhatikan dalam perumusan undang-undang dan kebijakan pemerintah, terutama terkait isu-isu penting seperti hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keamanan nasional.

Bagi komunitas Muslim, Transformasi menuju strategi anti rasisme ini menciptakan pengalaman baru untuk mengakui pengalaman diskriminasi yang sebelumnya sering terabaikan dalam narasi multikultural. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada dialog antarbudaya, tetapi juga meliputi perlindungan hak asasi manusia, penghapusan ujaran kebencian, serta peningkatan representasi Muslim dalam ruang publik. Oleh karena itu, strategi anti rasisme ini merepresentasikan upaya negara untuk beralih dari pendekatan simbolik menuju kebijakan yang lebih transformatif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Islamofobia dan Keterbatasan Perlindungan Kebijakan

Tegangan antara nilai-nilai multikulturalisme dan implementasi kebijakan semakin tampak jelas ketika kekerasan yang didorong oleh kebencian secara ekstrem, seperti serangan di Masjid kota Quebec yang terjadi pada 29 Januari 2017, yang menewaskan 6 orang dan 8 orang terluka. Pelakunya merupakan seorang mahasiswa yang memiliki kebencian terhadap imigran Muslim dan supremasi kulit putih. Dalam menghadapi peningkatan islamofobia mendorong munculnya inisiatif politik yang lebih terfokus dalam melindungi komunitas Muslim. Salah satunya adalah dengan adanya Motion M-103, yang memperlihatkan perubahan penting dalam kebijakan publik Kanada, dari pendekatan multikultural yang umum menuju pengakuan atas berbagai bentuk diskriminasi yang dialami khusus oleh kelompok Muslim. Untuk pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan lanjutan serta komitmen pemerintah baik dari tingkat federal atau daerah.

Pada tahun 2019, Bill 21 yang awalnya diperkenalkan sebagai rancangan undang-undang (Bill) pada 28 Maret 2019, kemudian disahkan oleh pemerintah Quebec sebagai undang-undang (*An Act Respecting the Laicity of the State*) pada 16 Juni 2019. Meskipun sudah resmi menjadi undang-undang, penyebutannya tetap “Bill 21”. Salah satu alasan yang membuat undang-undang ini tetap berlaku adalah penggunaan *notwithstanding clause* (Section 33) dalam *Canadian Charter of Rights and Freedoms*, klausul ini memberikan izin kepada pemerintah provinsi untuk memberlakukan sebuah undang-undang walaupun undang-undang tersebut dapat membatasi hak yang dijamin dalam *Charter*. Dengan memanfaatkan klausul ini pemerintah Quebec mempertahankan pemberlakuan Bill 21 meskipun mendapat kritik dan gugatan

hukum. Akibatnya, larangan terhadap penggunaan simbol-simbol agama bagi pegawai negeri tetap diberlakukan dan memberikan dampak yang signifikan bagi komunitas Muslim, khususnya perempuan berhijab, karena membatasi peluang mereka bekerja disektor publik serta meningkatnya pengalaman diskriminasi.

Beberapa penelitian akademis menunjukkan bahwa implementasi dari Bill 21 berdampak negatif yang signifikan bagi komunitas Muslim. Penelitian yang dilakukan *York University* melalui wawancara mendalam yang dilakukan setelah proses rekrutmen dan berlangsung selama 7 minggu dari akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023 terhadap Muslim di Quebec, yang menunjukkan bahwa kebijakan ini secara struktural menempatkan perempuan Muslim dalam posisi yang rentan, sebab mereka sering kali terpaksa memilih antara mempertahankan praktik keagamaan atau mempertahankan karir di sektor publik. Dampak dari situasi ini mencakup tekanan psikologis, terhambatnya kemajuan karir, keterbatasan dalam mendapatkan pekerjaan, dan meningkatnya pengalaman diskriminasi baik di tempat kerja ataupun dalam kehidupan sosial (Hasan et al., 2024). Hal tersebut diperkuat juga oleh hasil survei yang dilakukan oleh *Association for Canadian Studies* yang bekerja sama dengan lembaga riset Leger pada bulan April, Mei, dan Juni 2022, yang menunjukkan bahwa mayoritas perempuan Muslim yang ada di Quebec merasakan penurunan dalam tingkat penerimaan sosial sejak diberlakukannya Bill 21. Larangan simbol keagamaan membuat sejumlah posisi pekerjaan tidak dapat dijangkau oleh individu yang lebih memilih untuk tetap mengekspresikan identitas keagamaan mereka secara terbuka (Rubertucci, 2022).

Pada 2021, serangan terhadap keluarga Muslim Afzal di London, Ontario, yang menewaskan 4 orang. Motif utamanya adalah kebencian, supremasi kulit putih, dan aksi terorisme. Memasuki tahun 2022, seorang karyawan Muslim berusia 54 tahun menjadi korban penganiayaan di sebuah hotel di Markham, Ontario. Kemudian pada tahun 2023, seorang perempuan Muslim menjadi korban percobaan pembakaran di Perpustakaan Ajax, Ontario, dan pada tahun yang sama muncul dugaan penyerangan terhadap seorang pengacara Muslim oleh polisi di Gedung Pengadilan Oshawa. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kanada telah menerapkan kebijakan multikultural untuk melindungi keberagaman dan hak kelompok minoritas, praktik islamofobia masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan multikultural belum sepenuhnya mampu melindungi komunitas Muslim dari diskriminasi dan kekerasan.

Teori multikulturalisme Will Kymlicka, menekankan bahwa negara yang mengadopsi multikulturalisme harus lebih dari sekedar memberikan pengakuan simbolik terhadap keberagaman, tetapi juga harus menjamin perlindungan yang nyata melalui kebijakan dan lembaga yang dapat mengatasi kerentanan struktural kelompok minoritas. Oleh karena itu hak-hak khusus bagi kelompok minoritas (*Group Differentiated Rights*) dianggap penting untuk menciptakan masyarakat multikultural (Kymlicka, 1995). Konsep *Group Differentiated Rights* merujuk pada pemberian hak khusus kepada kelompok tertentu yang tidak secara otomatis berlaku untuk masyarakat luas. Contohnya, sebuah negara mungkin memberikan hak teritorial atau hak pemerintahan sendiri kepada masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan atas kedudukan khusus yang mereka miliki dalam tatanan sosial yang lebih luas, serta sebagai langkah untuk menjaga

kelangsungan budaya dan cara hidup tradisional mereka yang rentan terhadap tekanan dari kelompok mayoritas (Stanford Encyclopedia of Philosophy., 2022).

Meskipun multikulturalisme penting untuk mengakui keberagaman, tidak semua kelompok mengalami permasalahan atau tantangan yang serupa. Komunitas Muslim adalah salah satu kelompok yang paling sering menjadi sasaran kebencian dan stereotip negatif, sehingga pemerintah harus membuat kebijakan dan inisiatif yang lebih terarah bagi kelompok yang mengalami tingkat diskriminasi yang lebih tinggi terutama isu terkait islamofobia dan diskriminasi.

Dampak Kebijakan Multikultural Pada Komunitas Muslim

Kebijakan multikultural Kanada berhasil menciptakan ruang bagi komunitas Muslim untuk mempertahankan identitas keagamaannya. melalui kebebasan mendirikan tempat ibadah, menjalankan praktik keagamaan, serta menyelenggarakan pendidikan berbasis agama. Selain itu, berbagai program multikultural juga mendukung kegiatan dialog antar agama, penguatan organisasi komunitas, dan pendidikan yang bertujuan mengurangi prasangka terhadap kelompok minoritas.

Kemudian keterlibatan tokoh-tokoh Muslim dalam bidang politik menunjukkan bahwa komunitas Muslim tidak hanya menjadi bagian multikultural Kanada melainkan juga terlibat langsung dalam proses pengambilan kebijakan. Setiap lapisan masyarakat memiliki hak yang setara dalam aspek politik dan keagamaan (Nafisah et al., 2023). Hal ini terlihat dari semakin banyaknya tokoh Muslim yang menjabat posisi di parlemen atau pemerintahan. Dari aspek demografi, jumlah penduduk Muslim di Kanada mengalami peningkatan yang signifikan . Pada tahun 2011, pemerintah Kanada melalui survei Rumah Tangga

Nasional atau *National Household Survey* melakukan pendataan jumlah penduduk. Hasil sensus tersebut menunjukkan bahwa sekitar 1 juta penduduk di Kanada menyatakan identitas sebagai Muslim, atau setara dengan 3,2% dari keseluruhan populasi saat itu (Survey, 2011). Hal ini membuat Muslim sebagai salah satu kelompok agama minoritas terbesar di Negara Kanada. Dan pada tahun 2021, kelompok ras terbesar di kalangan Muslim di Kanada adalah orang Asia Selatan (37,6%), disusul oleh Arab (32,2%), Asia Barat (13%), dan kelompok kulit hitam (11,6%). Kemudian sekitar 30% Muslim di Kanada merupakan kelahiran dari negara tersebut, sedangkan sisanya berasal dari Pakistan (12,7%), Iran (5,8%), Maroko (4,2%), dan terakhir Aljazair (4,2%) (Tagoe, 2025).

Berdasarkan data statistik Kanada, jumlah penduduk Muslim bertambah dari 579.640 jiwa (2,0%) pada tahun 2001 menjadi 1.775.715 jiwa (4,9%) pada tahun 2021 (S. Canada, 2024). Hal ini disebabkan adanya kebijakan multikultural Kanada yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang terbuka dan menghargai keberagaman budaya serta agama. Kondisi ini membuat Kanada menjadi salah satu negara tujuan bagi banyak imigran, termasuk umat Muslim yang membuat jumlah penduduk Muslim di Kanada terus meningkat

Namun dampak positif kebijakan multikultural belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai bentuk diskriminasi terhadap komunitas Muslim. Narasi negatif yang mengaitkan Islam dengan isu keamanan dan terorisme masih berkembang di media, sehingga memengaruhi persepsi sebagian masyarakat terhadap Muslim. Kondisi ini terlihat dari masih adanya stereotip dan prasangka terhadap umat Islam, dan berbagai bentuk diskriminasi seperti kesulitan memperoleh pekerjaan bagi perempuan berhijab, penolakan terhadap penggunaan simbol keagamaan Islam di ruang publik, dan

meningkatnya kasus kejahatan kebencian (hate crime) yang menyasar individu maupun tempat ibadah umat Islam.

Secara keseluruhan dari tahun 2001–2023, kebijakan multikultural di Kanada berfungsi sebagai pedoman normatif yang melindungi hak beragama dan keragaman namun pengaruhnya terhadap komunitas Muslim terbatas oleh munculnya gelombang islamofobia setelah peristiwa global dan nasional, ketidakselarasan antara kebijakan yang ditetapkan di pusat dan implementasi di tingkat lokal, serta perlunya respons yang lebih cepat dan intervensi yang lebih terarah untuk perlindungan serta pencegahan kebencian. Untuk mengurangi konsekuensi negatifnya, banyak literatur dan usulan kebijakan menekankan pentingnya perpaduan antara pendidikan anti-bias, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap kejahatan kebencian, dukungan bagi korban, serta program inklusi yang berkelanjutan dan terukur.

Namun, dampak kebijakan multikultural tidak selalu berjalan sesuai harapan. Dalam penerapannya, pengakuan formal sering kali tidak disertai dengan penerimaan sosial yang setara sehingga berbagai bentuk diskriminasi dan islamofobia masih menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan multikultural.

SIMPULAN

Kebijakan multikultural di Kanada selama periode 2001-2023 dirancang secara normatif untuk mengakui serta melindungi keragaman budaya dan agama, termasuk hak-hak minoritas Muslim. Namun, penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan multikultural tersebut belum sepenuhnya efektif dan konsisten dalam implementasinya. Sejak terjadinya peristiwa 9/11, komunitas Muslim di Kanada mengalami peningkatan Islamofobia, diskriminasi sosial, dan pembatasan yang kemudian mempengaruhi rasa aman dan

akses mereka ke sektor publik. Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan hak secara resmi dan perlindungan nyata terhadap minoritas Muslim dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kebijakan multikultural Kanada selama tahun 2001 hingga 2023 memberikan dampak yang bersifat ambivalen terhadap minoritas Muslim. Di satu sisi, pemerintah federal terus menegaskan komitmennya terhadap multikulturalisme serta pencegahan islamofobia, namun di sisi lain adanya Bill 21 menunjukkan bahwa pada tingkat provinsi, kebijakan yang membatasi ekspresi dalam beragama masih dapat diterapkan dengan alasan sekularisme dan keamanan. Akibatnya sebagian Muslim tetap mengalami diskriminasi, rasa tidak aman, dan marginalisasi.

Dalam kerangka teori multikulturalisme Will Kymlicka, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan multikultural Kanada lebih banyak terfokus pada pengakuan normatif terhadap keragaman, tetapi belum sepenuhnya menjamin kesetaraan substantif bagi kelompok minoritas. Kymlicka menyoroti bahwa keadilan dalam negara yang multikultural tidak hanya mengharuskan pengakuan simbolik, tetapi juga perlindungan kebijakan yang mempertimbangkan posisi sosial kelompok minoritas agar tetap bisa berkontribusi dengan adil dan setara. Oleh karena itu, terdapat ketidakselarasan antara kebijakan federal dan provinsi serta keterbatasan respons terhadap islamofobia, yang mencerminkan tantangan dalam mewujudkan multikulturalisme yang inklusif dan adil untuk minoritas Muslim di Kanada.

Dengan demikian, dari penelitian ini bisa ditarik kesimpulannya bahwa Kebijakan Multikultural Kanada pada periode 2001-2023 belum sepenuhnya efektif dalam menangani islamofobia dan diskriminasi

secara mendalam. Diperlukan komitmen kuat dan konsisten dari pemerintah di semua tingkatan untuk memastikan bahwa prinsip multikulturalisme ini tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga direalisasikan melalui kebijakan nyata yang melindungi hak, kebebasan beragama, dan partisipasi penuh kelompok minoritas Muslim sebagai bagian penting dari masyarakat Kanada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, D., & Puspita Sari, V. (2023). Strategi Anti Rasisme Kanada terkait Keamanan Manusia terhadap Komunitas Minoritas Etnis Tionghoa-Kanada dan Kulit Hitam di era Pandemi COVID-19 pada 2020-2022. *Padjajaran Journal of International Relations*, 5(1), 53–74. <https://doi.org/10.24198/padjirv5i1.44681>
- Canada, P. M. of. (2021). *Statement by the Prime Minister on Canadian Multiculturalism Day*. <https://www.pm.gc.ca/en/news/statements/2021/06/27/statement-prime-minister-canadian-multiculturalism-day>
- Canada, P. M. of. (2023). *Prime minister announces appointment of Canada's first special representative on combatting Islamophobia*. <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2023/01/26/prime-minister-announces-appointment-canadas-first-special>
- Canada, S. (2003). *Major Religious Denominations, Canada, 1991 and 2001*. Statistics Canada.
- Canada, S. (2024). *The Canadian census: A rich portrait of the country's religious and ethnocultural diversity*. <https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/221026/dq221026b-eng.htm>

- Canadian Heritage. (2018). *Evaluation of the Multiculturalism Program 2011-12 to 2016-17*.
<https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/publications/evaluations/multiculturalism-program.html>
- Canadian Heritage. (2021). *Annual Report on the Operation of the Canadian Multiculturalism Act 2019-20*.
<https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/corporate/publications/plans-reports/annual-report-canadian-multiculturalism-act-2019-2020.html>
- Canadian Heritage. (2024). *About the Canadian Multiculturalism Act*. Government of Canada.
<https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/about-multiculturalism-anti-racism/about-act.html>
- Canadian Heritage. (2025). *Canada's Special Representative on Combatting Islamophobia*.
- Hasan, N. Z., Bakir, L. El, & Badawy, Y. (2024). *Social Discord and Second-class Citizenship: A Study of the Impact of Bill 21 on Québec Muslim Women in Light of the COVID-19 Pandemic*. National Council of Canadian Muslims.
- Jamil, U. (2012). *Discrimination Experienced by Muslim in Ontario*. *Diversity Magazine*.
<https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/about-multiculturalism-anti-racism/about-act.html>
- Justice, C. D. of. (2024). *Charterpedia – Section 27: Multicultural Heritage*. Department of Justice Canada.
<https://www.justice.gc.ca/eng/csjsjc/rfc-dlc/ccrf-ccdl/check/art27.html>
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Clarendon Press.
- Nafisah, D., Mawardi, K., & Nasrudin. (2023). *Islam and Multiculturalism in The Charter of Medina (Socio-Historical Studies)*. *International Journal of Socio Science, Education, Communication and Economics*, 2(2).
- Pamuji, Z., & Mawardi, K. (2023). *Islamic Religious Education Curriculum Development Based On Multiculturalism in Merdeka Curriculum At Elementary School*. *International Journal of Education and Teaching Zone* 2(2), 286–298.
- Rubertucci, A. (2022). *Quebec's Bill 21 "Disturbing" Impact on Religious Minorities: Study*. CiityNews Montreal.
<https://montreal.citynews.ca/2022/08/10/quebec-bill-21-religious-secularism/>
- Sarpini, & Mawardi, K. (2023). *The impact of minority extremism on Islamic economics in multicultural Indonesia*. *Journal of Islamic Economics, Management, and Bussines (JIEMB)* 5(1), 125–144.
<https://doi.org/10.21580/jiemb.2023.5.1.16819>
- Stanford Encyclopedia of Philosophy. (2022). *Group Rights*.
<https://plato.stanford.edu/entries/rights-group/>
- Survey, N. H. (2011). *Analytical document Immigration and Ethnocultural Diversity in Canada*. Statistics Canada.
- Sustanto, & Mawardi, K. (2023). *Inter-Religious Prejudice in A Multicultural Society*. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics* 2(1), 153–160.

- Suwarno, D., & Mawardi, K. (2023). Models of Religious Conflict Resolution in Multicultural Societies. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics* 2(1), 145–152.
- Tagoe, Y. (2025). *How Muslims Became a Vital Component Of Canada's Population*.
<https://immigration.ca/how-muslims-became-a-vital-component-of-canadas-population/>
- Wibowo, H. S. (2023). *Islam di Kanada: Kehadiran, Tantangan, dan Kontribusi* (W. Anita (ed.)). Tiram Media